

PENGUMUMAN TENDER

No.28/ 1 /DMAP-GPPU-PPPU/PENG/B tanggal 4 Februari 2026

Bank Indonesia akan melaksanakan Tender Pengadaan Jasa Pekerjaan Pemborongan Operasional Museum Bank Indonesia (MuBI) Periode Tahun 2026-2028, dengan nomor pengadaan RFQ:52450 melalui aplikasi E-Procurement Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Ruang lingkup Pekerjaan adalah penyediaan tenaga kerja MuBI dalam rangka melaksanakan kegiatan edukasi, pengelolaan koleksi dan tata pamer, serta hubungan masyarakat (humas) dan pemasaran MuBI dengan optimal .

II. Pagu anggaran sebesar Rp16.123.511.368,77 sudah termasuk PPN 12%.

III. Persyaratan Peserta Tender:

1. Perusahaan adalah rekanan Bank Indonesia yang terdaftar pada aplikasi E-Procurement Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>);
2. Perusahaan memiliki badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
3. Perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kerja dan memiliki minimal salah satu sertifikasi yang masih berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:

Kode	Sub Bidang
KADIN 5.07.12	Penyediaan Tenaga Kerja
KADIN 5.07.12.01	Penyediaan Tenaga Kerja Lokal

Dalam hal sertifikat sedang dalam proses perpanjangan, maka dapat dilengkapi dengan surat keterangan pengurusan perpanjangan dari instansi/lembaga yang berwenang dengan melampirkan dokumen sertifikat terakhir;

4. Perusahaan memiliki minimal salah satu ijin usaha (NIB) dengan kode KBLI 78300 (Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia) dan/atau KBLI 78200 (Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu);
5. Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2021-2025) memiliki pengalaman sebagai pelaksana jasa operasional layanan publik/customer service, dengan nilai kontrak minimal sebesar Rp5 Miliar/tahun dalam 1 (satu) kontrak, yang dibuktikan dengan Kontrak/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian dan dokumen pendukung sejenis lainnya;
6. Perusahaan memiliki pengalaman dalam menyediakan tenaga kerja dengan jumlah minimal 25 orang dalam satu kontrak di bidang layanan publik/customer service, yang dibuktikan dengan Kontrak/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian dan dokumen pendukung sejenis lainnya;
7. Perusahaan memiliki sertifikat atau tanda kepesertaan BPJS (Ketenagakerjaan dan Kesehatan);
8. Perusahaan memiliki sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang masih berlaku. Dalam hal sertifikat sedang dalam proses perpanjangan, maka dapat dilengkapi dengan surat keterangan pengurusan perpanjangan dari instansi/lembaga yang berwenang dengan melampirkan dokumen sertifikat terakhir;
9. Dalam hal pernah melaksanakan proyek di Bank Indonesia dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (2024-2025), Perusahaan secara umum tidak memiliki history penilaian kinerja Kurang dari Bank Indonesia;
10. Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2024;
11. Perusahaan memiliki Laporan Keuangan tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian; dan
12. Persyaratan lainnya dengan menyampaikan Surat Pernyataan sebagai berikut:
 - a. Tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
 - b. Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara;
 - c. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - d. Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa; dan
 - e. Tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia.

IV. Pendaftaran calon peserta Tender dilakukan melalui <https://eprocurement.bi.go.id> dengan batas waktu pendaftaran ditetapkan mulai tanggal 5 s.d. 12 Februari 2026, dengan melengkapi dokumen pendaftaran calon peserta Tender dengan cara mengunggah dokumen (tidak dalam bentuk link) ke <https://eprocurement.bi.go.id> yang terdiri atas:

1. Scan surat permohonan untuk menjadi Peserta Tender yang ditandatangani oleh Direktur/Pemimpin/Penanggung Jawab perusahaan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan);
2. Scan sertifikat KADIN yang masih berlaku. Dalam hal sertifikat sedang dalam proses perpanjangan, maka dapat dilengkapi dengan surat keterangan pengurusan perpanjangan dari instansi/lembaga yang berwenang dengan melampirkan dokumen sertifikat terakhir sebagaimana dipersyaratkan butir III.3;
3. Scan asli Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan dengan kode KBLI 78300 dan/atau KBLI 78200 sebagaimana dipersyaratkan butir III.4;
4. Scan asli Kontrak/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian dan dokumen pendukung sejenis lainnya yang membuktikan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir (2021-2025) perusahaan memiliki pengalaman sebagai pelaksana jasa operasional layanan publik/customer service, dengan nilai kontrak minimal sebesar Rp5 Miliar/tahun dalam 1 (satu) kontrak sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.5;
5. Scan asli Kontrak/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian dan dokumen pendukung sejenis lainnya yang membuktikan bahwa perusahaan memiliki pengalaman dalam menyediakan tenaga kerja dengan jumlah minimal 25 orang dalam satu kontrak di bidang layanan publik/customer service sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.6;
6. Scan asli sertifikat atau tanda kepesertaan BPJS (Ketenagakerjaan dan Kesehatan) sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.7;
7. Scan asli sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang masih berlaku. Dalam hal sertifikat sedang dalam proses perpanjangan, maka dapat dilengkapi dengan surat keterangan pengurusan perpanjangan dari instansi/lembaga yang berwenang dengan melampirkan dokumen sertifikat terakhir sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.8;
8. Scan asli bukti pembayaran pajak Tahun 2024 sebagaimana butir III.10;

9. Scan asli Laporan Keuangan tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian sebagaimana dipersyaratkan butir III.11;
10. Scan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) di atas meterai Rp10.000,00, yang menyatakan bahwa:
- Tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
 - Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara;
 - Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa; dan
 - Tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia.
- Seluruh pernyataan a. s.d e. di atas dinyatakan dalam 1 (satu) Surat Pernyataan. Dalam hal surat pernyataan terdapat ketidaklengkapan meterai, dapat menyampaikan susulan ketidaklengkapan dimaksud.
- V. Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon peserta Tender secara lengkap (tidak dalam bentuk *link*) serta memenuhi persyaratan ke dalam aplikasi *E-Procurement*, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Pengadaan selanjutnya.
- VI. Dalam hal calon peserta Tender mengalami kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, silakan menghubungi petugas *helpdesk E-Procurement* pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat e-mail: Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id.
- VII. Komitmen Integritas Pengadaan:
- Pelaksanaan Pengadaan tunduk pada ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
 - Pengadaan di Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta gratifikasi. Panitia Pengadaan dan Peserta Tender wajib mematuhi komitmen ini.
 - Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun dari setiap proses Pengadaan.
 - Dalam hal terdapat indikasi yang bertentangan dengan komitmen tersebut, mohon segera dilaporkan melalui kanal *whistleblowing system* Bank Indonesia pada tautan https://www.bi.go.id/wbsbi/add_wbs2.aspx

PANITIA TENDER

KOP PERUSAHAAN
SURAT PERMOHONAN

No./..../.....

Kepada :
Bank Indonesia
Jl. M. H. Thamrin No. 2
JAKARTA

Perihal: Permohonan Menjadi Peserta Tender Pengadaan

Dengan hormat,

Setelah kami membaca dan meneliti Pengumuman Tender No. tanggal, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan
Dalam hal ini mewakili : PT.
Bersama ini kami mengajukan permohonan menjadi Peserta Tender Pengadaan

Kami menyatakan bahwa data yang kami sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta melepaskan Bank Indonesia dari semua gugatan hukum apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam data kami dan menyadari sepenuhnya bahwa Peserta yang lulus seleksi yang dapat ikut serta dalam proses tender berikutnya.
Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Jakarta,

Yang menyatakan,

Meterai
Rp10.000,00

(.....)
Tanda-tangan Direktur Utama/
Direktur/ Pimpinan/ Penanggung

KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan : Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT.

Dalam rangka mengikuti Tender , dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
2. Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara;
3. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
4. Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa; dan
5. Tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia.

Jakarta,

Yang menyatakan,

Meterai
Rp10.000,00

(.....)
Tanda-tangan Direktur Utama/
Direktur/ Pimpinan/ Penanggung
Jawab Perusahaan dan cap
perusahaan

Note: dalam hal yang menandatangani bukan Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan yang berwenang sesuai Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan wajib dilampirkan Surat Kuasa kepada yang bersangkutan.